

JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Islam

- ✓ **FIQH AL-WAQI' DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER MELALUI TADABBUR AL-QURAN**
- ✓ **REORIENTASI KAJIAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA: SEBUAH SURVEI SINGKAT**
- ✓ **KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSAWAMAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)**
- ✓ **KORELASI KHUSYUK DALAM SHALAT TERHADAP FUNGSI OTAK DEPAN**

Vol. 06, No. 2

Juli – Desember 2014

Diterbitkan Oleh :
Jurusan Syari'ah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Islam

**FIQH AL-WAQI' DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER
MELALUI TADABBUR ALQURAN.**

**REORIENTASI KAJIAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA
DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA: SE.BUAH
SURVEI SINGKAT**

**KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
MUSAWAMAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (LKS)**

**KORELASI KHUSYUK DALAM SHALAT TERHADAP
FUNGSI OTAK DEPAN**

Vol. 06, No. 2

Juli - Desember 2014

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Syari'ah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



JURNAL JURISPRUDENSI

(Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam)

PENANGGUNG JAWAB

DR. H. Zulkarnaini Abdullah, MA

REDAKTUR

Drs. H. Abdullah AR, MA

REDAKTUR PELAKSANA

Zainal Abidin, S.Ag, MH

EDITOR

Muhammad Dayyan, S. Ag, M.Ec

ANGGOTA REDAKSI

Abdul Hamid, MA

Drs. Nawawi Marhaban, MA

Anizar, MA

Syafi'eh, M. Fil. I

STAF AHLI

Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA

(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. DR. A. Hamid Sarong, SH, MH

(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. DR. H. Amiur Nuruddin, MA

(IAIN Sumatera Utara)

Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS

(UNSYIAH Banda Aceh)

Dr. Bharuddin Che Pa

(UNIV Malaya Kuala Lumpur)

Dr. Zulkarnain, MA

(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH

(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

DESAIN GRAFIS AND LAYOUT COVER

A d n a n, SHI

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Jalan Meurandeh–Langsa Lama–Kota Langsa,

Provinsi Aceh

Dewan redaksi menerima tulisan ilmiah yang berhubungan dengan Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam. Naskah diketik rapi sepanjang 15 – 20 halaman kwarto. 1.5 spasi, dilengkapi dengan **judul, nama penulils, abstrak, key word, Footnote, daftar pustaka, disertai dengan kurikulum vitae dan surat pernyataan keaslian naskah dan belum pernah dipublikasikan di media manapun.** Naskah dikirim dalam bentuk *soft copy*/CD, format MS Word. Rtf dan satu print out nya. Team redaksi mempunyai hak untuk mengedit naskah tanpa merubah subtansi dan artikel yang tidak dimuat menjadi milik redaksi. Naskah yang dimuat akan diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Soft copy* naskah dialamatkan ke E-mail: redaktur.jurisprudensi@yahoo.com, dan *hardcopy* ke: Dewan Redaksi Jurnal Jurisprudensi Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Kampus Meurandeh, Jl. Meurandeh – Kota Langsa –Provinsi Aceh.

PENGANTAR REDAKSI

Jurisprudensi edisi Juli-Desember tahun 2014 lebih banyak mengulas metodologi penetapan hukum dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Dalam edisi ini menurunkan sebelas tulisan dari berbagai Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu syariah, baik pada tataran metodologi pengambilan hukum, konsep aplikasi legal formal, penggalan nilai-nilai murni dari Alquran, sampai membedah pemikiran tokoh dalam aspek tertentu.

Pada edisi ini Jurisprudensi memuat tulisan Fiqh Al-Waqi' dan Pengaruhnya Terhadap Penyelesaian Problemantika Kontemporer Melalui Tadabbur Alquran karya Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, kemudian Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i (Kajian Terhadap Kitab Ar-Risalah karya Karya Sitti Suryani, selanjutnya Maqashid As-Syariah Dalam Kajian Sosial; sebuah upaya Membuka Pintu Ijtihad karya Fatimah Zuhrah dan Diskursus Kedudukan Illat Qiyasi Dalam Pengistimathan Hukum Menurut Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zhahiri karya Yessi Aswita mewakili karya dalam rumpun kajian Ushul Fiqh, dalam rumpun kajian hukum Islam dan perundang-undangan adalah Hakikat Korupsi Dalam Hukum Islam dan Penyerapan Sanksinya Kedalam Sistem Hukum Nasional karya Nasrullah, Harta Seuharekat Dalam Perkawinan karya Ridwan dan Wilayah Mazalim (Kedudukan dan Kewenangan dalam Peradilan Islam karya Anizar mewakili pemikiran dan kajian Fiqh klasik dan modern. Kemudian dalam bidang Ekonomi Syariah ada tema Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah Dalam Lembaga Keuangan Syariah karya Iskandar.

Jurnal ini diharapkan dapat membawa nilai tambah kepada referensi yang telah tersedia dan mampu memotivasi pembaca untuk menelaah perkembangan hukum Islam secara kritis dan analitis, tetapi objektif, akademik dan selektif. Sebab belakangan ini telah muncul pemikiran-pemikiran terhadap peristiwa hukum Islam yang meremehkan dalil syar'i atau sebaliknya terlalu ketat dalam memahami teks.

Namun demikian disadari sepenuhnya jurnal ini masih jauh dari sempurna dan bahkan kami merasakan belum sempat mengakomodir semua kebutuhan pembaca terhadap kajian-kajian hukum Islam. Mudah-mudahan dengan masukan dan kritikan dari para pembaca, penerbitan selanjutnya akan lebih baik.


Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi pemikirannya berupa tulisan kedalam jurnal edisi ini, semoga setiap goresan tinta penulis menjadi obor dan suluh dalam mencapai kebenaran sehingga membawa kebaikan kepada diri sendiri dan kepada seluruh pembaca dimana saja mereka berada.


Selamat membaca.


Redaktur


DAFTAR ISI


PENGANTAR REDAKSI.....	i
DAFTAR ISI	ii


 FIQH AL-WAQF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYELESAIAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER MELALUI TADABBUR ALQURAN , Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib.....	
--	--

 METODE ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI' (KAJIAN TERHADAP KITAB AR-RISALAH) , Sitti Suryani	29
--	----


 HAKIKAT KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENYERAPAN SANKSINYA KEDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Nasrullah	49
---	----


 MAQASID AS-SYARIAH DALAM KAJIAN SOSIAL: SEBUAH UPAYA MEMBUKA PINTU IJTIHAD , Fatimah Zuhrah.....	71
---	----


 DISKURSUS KEDUDUKAN ILLAT QIYASI DALAM PENGISTINBATHAN HUKUM MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI' DAN MADZHAB ZHAHIRI , Yessi Aswita ...	87
--	----


 REORIENTASI KAJIAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA: SEBUAH SURVEI SINGKAT , Azhari Akmal Tarigan	99
---	----

 KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSAWAMAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) , Iskandar	120
---	-----

 HARTA SEUHAREUKAT DALAM PERKAWINAN , Ridwan.....	141
---	-----

 KUASA NEGARA, KUASA AGAMA: STUDI TENTANG PERDEBATAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA , Muhammad Alkaf.....	161
--	-----

 WILAYAH AL-MAZALIM (KEDUDUKAN DAN KEWENANGANNYA DALAM PERADILAN ISLAM) , Anizar.....	172
---	-----

 KORELASI KHUSYUK DALAM SHALAT TERHADAP FUNGSI OTAK DEPAN , Fakhruurrazi	181
--	-----

MAQASID AS-SYARIAH DALAM KAJIAN SOSIAL: SEBUAH UPAYA MEMBUKA PINTU IJTIHAD

Fatimah Zuhrah¹

Abstrak

The advancement of science and technology has automatically affect the socio- cultural aspect of human life. Iain besar masalah sosial kemasyarakatan dalam hukum Islam diatur dengan nash-nash pokok yang bersifat genaral saja. The changes that come along with new problems requires new solotions to them; and that makes the practice of *Ijtihad* is indespensible. However, before addressing the method of *Ijtihad*, it is important to discussion the *maqasid as-syariah*, because the latter could the reason for the *Ijtihad*, to find solutions for the problems which are not clearly covered by the *Nash* that the people face in their life.

Key Word: *Maqasid Syariah, Kajian Sosial, Ijtihad*

A. Pendahuluan

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (divine law). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah yang tertuang dalam Alquran dan al-Sunnah. Sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan serta mewujudkan kebaikan tertinggi di dunia dan akhirat.²

Perwujudan tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Di atas semua itu ditentukan pula oleh adanya hubungan yang baik antara manusia sebagai makhluk dan hamba, dan Allah sebagai khalik dan Tuhan. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum (al-Ahkam al-Syar'iyah). Aturan-aturan hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam masalah akidah dan ibadah yang bersumber dari nash (masadir al-ahkam) yakni Alquran dan Hadis. Sumber nash yang berasal dari Alquran dan Hadis tersebut secara rinci memiliki daya ikat dan validitas kuat yang bersifat qathi (pasti). Oleh karenanya terdapat pengaturan bahwa yang qathi tidak diperbolehkan

¹. Penulis adalah Peneliti pada LP2M UIN Sumatera Utara.

². Yusuf Qardawi, *Madhal Lidirasah as-Syariah al-Islamiyyah*, (Qohirah: Maktabah Wahbah, 2001), h. 57.

untuk dilakukan perubahan dan pengembangan terhadapnya, dan inilah yang disebut secara tegas dalam sebuah hadis nabi bahwa pengembangan dalam urusan keagamaan tanpa ada perintah sebelumnya dianggap tertolak.

Sebagaimana tertera:³

عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله " من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رد "

Artinya: "Barang siapa membicarakan sesuatu yang tidak masuk dalam pembicaraan kita maka dia tertolak"

Pengertian hadis tersebut mencakup bidang aqidah, ibadah mahdah, serta bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah diatur secara rinci dan qathi di dalam nash, dan dengan demikian bidang tersebut tidak termasuk lapangan ijtihad. Berbeda dengan masalah akidah, ibadah mahdah dan masalah muamalah-- yang dengan rinci dan qathi telah diatur nash sebagaimana penjelasan di atas-maka, masalah muamalah atau masalah sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, yang aturan-aturan hukumnya tidak dijelaskan secara qathi, dan hanya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja, bersifat zanni (tidak pasti), dengan bertitik tolak dari garis-garis besar aturan-aturan hukum Allah tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan keagamaan yang senantiasa mengitarinya.

Salah satu alasan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah karena tujuan penetapan syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Sementara kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah selalu tetap/stagnan, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kemajuan ilmu dan teknologi.

Sebagian besar pengaturan masalah sosial kemasyarakatan dalam hukum Islam adalah dengan nash-nash dalam bentuk pokok-pokoknya saja, artinya banyak masalah sosial kemasyarakatan yang belum dan tidak dijelaskan secara terperinci di dalam nash, sementara perubahan dan perkembangan budaya dan zaman menuntut adanya

³. M. Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Singapura: Maktabah wa Matbaah Sulaiman Zamar'i, t.th), II, h.112.

perkembangan hukum, maka masalah sosial kemasyarakatan ini menjadi lapangan ijtihad. Ini tidaklah berarti bahwa masalah sosial kemasyarakatan tidak mengandung dimensi ibadah, karena dalam Islam, segala aktivitas manusia merupakan wujud peribadatan kepada Allah. Adanya pembedaan di atas lebih ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap masalah-masalah yang tidak menerima perubahan dan pengembangan dengan masalah yang dapat menerima perubahan dan pengembangan dengan berbagai metode ijtihad dan pertimbangan yang diterapkan.

Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya tersebut didasarkan atas maqasid as-syariah. Maqasid Syaria'ah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam tersebut, dan membebarkannya terhadap manusia. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kajian terhadap maqasid as-syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum terhadap masalah sosial yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Karena adanya maqasid as-syariah dapat menjadi landasan hukum yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam nash.

Ruang Lingkup Kajian Sosial dalam Maqasid Syaria'ah

Ruang lingkup kajian sosial dalam maqasid syariah, adalah seluruh aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya individu ataupun kelompok, dan terinci sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai pemilikan dan peralihan harta benda dan segala hak milik yang berupa materi dan kebendaan.
2. Hukum Perkawinan, yaitu peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, hak dan kewajiban suami/istri, keharmonisan keluarga, perceraian dan sebagainya.
3. Hukum Waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pembagian harta benda yang disebabkan oleh adanya kematian.
4. Hukum Pidana (jinayat), yaitu hukum yang berhubungan dengan jiwa, akal dan kehormatan manusia.
5. Hukum Siyasah (politik), yakni hukum yang berhubungan dengan negara, pemerintahan, masyarakat dan segala problematikanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kajian sosial dalam maqasid syariah adalah seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik secara individu ataupun kelompok.

B. Teori Maqasid as-Syariah

Maqasid syariah, maqasid syar'i dan al-maqasid al-syar'iyyah adalah istilah-istilah yang mempunyai maksud yang sama.⁴ Para ulama terdahulu tidak mendefinisikan maqasid syariah secara jelas dan terperinci. Malahan, pembahasan definitif istilah ini banyak dipelepori oleh ulama kontemporer. Seperti Maqasid As-Syariah diartikan dengan Masalih, al-Masalih al-Ammah, al-masalih al-mursalah, dsb.⁵ Seperti Muhammad al-Tahir bin 'Asyur yang menyatakan bahwa maqasid syariah ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian dalam semua keadaan pensyariaan atau dalam sebahagian besar pensyariatannya.⁶ M. Rawwas mengindentikkan penggunaan kalimat maqasid as-syariah dengan ra'yu.⁷ Al-Husni mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syari'ah adalah tujuan yang memberikan kebaikan yang dikehendaki oleh hukum-hukum syari'at dan makna yang dikehendaki oleh Allah.⁸

Secara definitif, maqasid Syaria'ah ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dari segi bahasa maqasid al-syari'at berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam (maqasid syariah) merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid as-Syari'ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam.⁹ Yusuf Qardawi mengatakan bahwa Ulama salaf dan khalaf sepakat mengatakan bahwa hukum-hukum syariat--secara jumlah--

⁴ Ahmad al-Rusaini, *Nazariyat al-Maqashid Inda al-imam al-Syathibi* (Beirut: Muassasah al-Jamiah, 1992), h. 17.

⁵ Lihat Yasser Audah, *Fiqh al-Maqasid* (USA, Al-Ma'had al-alimy lii fikr al-islamy, 2007), h. 15.

⁶ Moh Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Syari'at al-Islamiyah*, (Yordan: Dar Nafais, 2001), h. 251.

⁷ M. Rawwas Qol'ajy, *Mabahis Fi al-Iqtisad al-Islamiyah min Usulihi al-Fiqhiyyah*, (Beirut, Dar an-Nafais, 1991), h. 23.

⁸ Ahmad al-Rusaini, *Nazariyat..*, h. 119.

⁹ Ismail M. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 18.

berdasarkan kepada illat (sebab hukum). Dan seluruh hukum-syariat tersebut memiliki (maqasid) tujuan. Selanjutnya ia menegaskan bahwasanya maqasid (tujuan), illat (sebab-sebab), dan hukum dari Syariat merupakan sesuatu yang bersifat rasional dan bisa dipahami oleh manusia sebahagiannya bahkan secara terperinci, kecuali sebahagian hukum-hukum ibadah mahdah (yang bersifat taabudi) dan sesuatu yang mengandung hikmah yang rasional. Tujuan utama pembentukan syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan tertinggi di dunia dan akhirat.¹⁰

Pemikiran tentang maqashid as-syari'ah selalu dihubungkan kepada Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pertama paling populer yang mengembangkan teori maqashid as-syari'ah. Sementara Yusuf Ahmad al-Badwi, menyimpulkan dari penelitiannya terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah beberapa poin yang berhubungan dengan maqasid syariah menurut pandangan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:¹¹

1. Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan adalah istilah yang mempunyai maksud yang sama.
2. Allah mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-Nya.
3. Tujuan-tujuan tersebut merupakan kehendak Allah dalam syariat-Nya dan disukai olehNya karena mencerminkan penghambaan kepada-Nya.

Dalam bukunya Abdul Wahab Khallaf menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syara tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui tujuan hukum (maqasid as-syariah) dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.¹²

Seorang mujtahid haruslah mengetahui dengan benar tujuan hukum Islam (maqasid as-Syariah) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Hadis. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat ditetapkan berdasarkan satu ketentuan hukum-- karena adanya perubahan struktur sosial-- ataukah hukum tersebut tidak dapat lagi untuk diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqasid al-

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Madhal Lidirasah*, h. 61

¹¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2000), h. 52.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 198

syariah merupakan key word bagi seorang mujtahid dalam berijtihad untuk menghasilkan sebuah ketetapan hukum.

Tujuan Hukum Syariah (Maqasid al-ahkam as-syariyyah)

Syariat Islam sebagai aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah swt kepada manusia menempatkan penjagaan terhadap kemaslahatan dan pencegahan keburukan sebagai pondasinya. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

﴿لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya : M. Abu Zahrah dalam bukunya menjelaskan ada tiga orientasi yang menjadi tujuan hukum Islam yakni¹³:

1. Perbaikan individu (tahzib al-fard) sehingga seseorang tersebut menjadi sumber kebaikan dan bukan sumber keburukan bagi jamaahnya. Seluruh ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah swt bertujuan untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan sosial yg utama.
2. Menegakkan keadilan dalam komunitas islam. Berlaku adil terhadap sesama muslim dan adil dengan yang bukan muslim. Keadilan dalam agama Islam memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi. Keadilan dalam Islam juga berlaku dalam banyak bidang yang berbeda-beda; nilai keadilan terdapat pada ketetapan hukum, putusan para hakim (yurisprudensi), kesaksian, praktek transaksi (muamalah) dengan orang lain, misalnya dengan penetapan hukum bahwa manusia memiliki hak-hak sebagaimana hak miliknya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw secara gamblang di dalam sabdanya: "bergaulah dengan manusia dengan cara yang kamu inginkan mereka mempergaulimu seperti itu".

Sisi keadilan syariat Islam juga terlihat pada orientasi terhadap keadilan sosial. Atas dasar itulah hukum Islam memandang manusia sama di muka hukum; tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam syariat Islam tidak ada tingkatan dan klasifikasi yang menganggap satu kelompok memiliki keistimewaan yang lebih daripada kelompok yang lain.

Nilai keadilan sosial dari syari'at Islam juga dibuat dalam bentuk yang paling sempurna. Yakni, Islam mewajibkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam sangat

¹³. M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Araby, 1958), h. 364 - 366.

melarang tindakan genocide (pemusnahan massal) meskipun itu dalam kondisi perang. Termasuk di dalam bentuk perwujudan keadilan sosial adalah bahwa Allah Swt menempatkan manusia berada di dalam kesempatan yang sama besarnya dalam hal berkarya dan berprestasi. Keadilan sosial itu terwujud dari hasil yang diperoleh oleh seseorang tergantung pada besar kecilnya usaha yang dilakukannya, baik buruknya kerja yang dilakukannya. Siapapun akan memperoleh sesuai dengan kadar pekerjaannya.

1. Mewujudkan kebaikan (mashlahah). Kemaslahatan merupakan tujuan hakiki yang selalu terdapat pada setiap hukum syari'at Islam. Tidak ada satu hal pun dari syari'at Islam yang ditetapkan berdasarkan Alqur'an dan sunnah kecuali di dalamnya pasti terdapat kebaikan hakiki, meskipun orang-orang yang hati dan pikirannya tertutupi oleh hawa nafsu tidak bisa menemukan kebaikan (mashlahah) itu.
2. Kemaslahatan yang dimaksudkan oleh agama Islam bukanlah berdasarkan hawa nafsu, melainkan kebaikan yang sebenarnya yang bersifat global, bukan bersifat parsial.

C. Maqasid as-Syariah Sebagai Upaya Membuka Pintu Ijtihad

Keberhasilan penggalian hukum dari dalil tafsili (Alquran dan Hadis) akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maksud syara itu sendiri yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafsili tersebut. Maka dalam corak seperti ini maqasid as-syariah tidak hanya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum yang dapat berperan ganda sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, namun lebih dari itu, dengan pertimbangan maqasid as-syariah, para ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk hukum yang akan dmunculkan dalam upaya ijtihad hukum. Upaya ijtihad dengan kompleksitas hukum dewasa ini memerlukan analisis berdimensi filosofis, antara lain dalam wujud pemahaman maqasid syariah.

Yusuf Qardawi dalam bukunya menyatakan bahwa sepakat para Ulama menegaskan bahwa tujuan hukum Syariat (maqasid as-syariah) ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.¹⁴ Pernyataan ini menjelaskan bahwa seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, apakah masalah ibadah atau muamalah merupakan aturan-aturan Syariat yang ditetapkan untuk tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

¹⁴. Yusuf Qardawi, *Madhal.....* h. 59

Maqasid al-Syaria'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal menurut Syatibi: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan menjaga kehormatan (al-iradh) ditambah oleh al-Qarafi. Kelima hal inti tersebut disebut juga dengan al-Kulliyat al-khams atau ad-dharurat al-khams.¹⁵

Kemaslahatan manusia dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya hal-hal yang esensi dari kelima unsur ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang sempurna. Kemuliaan hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan dan penjagaan terhadap kelima hal yang merupakan inti dari maqasid syari'ah. Kelima Penjagaan dan pemeliharaan (al-Kulliyat al-khams atau ad-dharurat al-khams) tersebut, sebagaimana Al-Mursi menjelaskannya sebagai berikut:¹⁶

1. Memelihara Agama (al-Muhafazhah ala al-Diin). Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya. Sebab keagamaan adalah fitrah manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.
2. Memelihara Jiwa (al-Muhafazhah ala an-Nafs). Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syaria'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.xv.

3. Memelihara Akal (al-Muhafadzah ala al-'Aql). Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, yang nantinya akan menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan akal.
4. Memelihara Keturunan (al-Muhafadzah ala an-Nasl). Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
5. Memelihara Harta (al-Muhafadzah ala al-Mal). Mencegah perbuatan yang menodai harta manusia secara individu ataupun kolektif, misalnya ghashab (pencurian). Adanya aturan hukum Islam tentang sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang adalah bentuk tujuan hukum Islam dalam penjaagaan harta (hifz al-mal).

Maslahat/Maqasid Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu tingkatan. Pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadat (kerusakan) bisa saja terjadi pada waktu bersamaan. Artinya aturan hukum (Syariat) itu bisa jadi masalah bagi sekelompok orang namun disaat yang sama menjadi mafsadat bagi orang lain, demikian juga yang bersifat individual. Saling bertentangan atau berbenturan antara kemaslahatan dan mafsadat dalam satu waktu tersebut tentu menghendaki adanya pilihan untuk mendahulukan dan meninggalkan salah satunya.

Maslahat/Maqasid Syari'ah menurut Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni 1) Dharuriyat (Primer), 2) hajjiyat (Sekunder), dan 3) Tahsiniyat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap).

Sementara Yasser Audah¹⁷ menyebutkan dengan istilah Maqasid Ammah (umum), Khassah (khusus) dan Juziyyah (sebagian). Tingkatan-tingkatan maslahat/maqasid syariah tersebut yakni:¹⁸

1. Kebutuhan Dharuriyat (Primer).

Yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Birimenyebutkan bahwa maslahat dharuriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.¹⁹

Yang termasuk dalam lingkup maslahat dharuriyat ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama (hifz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-akl), pemeliharaan keturunan (hifz an-nasb) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal). Umumnya ulama ushul fiqh sependapat tentang lima hal tersebut sebagai maslahat yang paling asasi. Imam al-Ghazali menerangkan: "Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Dalam bidang hukum Muamalat kategori maslahat dharuriyat dapat dilihat beberapa contohnya yakni dalam hal-hal (1) pemeliharaan agama (hifz ad-din): ketetapan syariat tentang hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain, dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya, sehingga ketetapan tersebut merupakan penjagaan terhadap agama; (2) pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs): adanya syariat tentang memasyarakatkan hukuman qishas, karena dengan adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa manusia; (al-baqarah:179), (3) pemeliharaan akal (hifz al-akl) mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif; (4) pemeliharaan keturunan (hifz an-nasb) mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab (keturunan); (e) pemeliharaan harta (hifz al-mal): mewajibkan mendera pencuri, karena dengan demikian dapat memelihara harta yang menjadi sumber kehidupan.

¹⁷. Dalam bukunya Yasser Audah membagi konsep maqasid syariah ini kepada Maqasid Ammah, Khassah dan Juziyyah. Yasser Audah, *Fiqh al-Maqasid*, h. 16-19.

¹⁸. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 69.

¹⁹ Ibid.

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (maslahat) tersebut, tergolong dharury (penting dan urgent). Syariat Islam sangat menekankan terhadap pemeliharaan kelima hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (nafs/kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (baca:haram) karena itu bagi orang dalam keadaan darurat dan tidak ditemukan barang lain selain yang terlarang (haram) tersebut dan dikhawatirkan akan mati kelaparan bila tidak menggunakan atau memakan barang terlarang tersebut, maka dia dibolehkan untuk memakan dan menggunakan barang terlarang tersebut, seperti memakan bangkai, daging babi atau minum arak.

2. Kebutuhan hajjiyat (Sekunder)

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan ihtiyath (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Termasuk dalam kategori hajjiyat adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi terkadang manusia menghadapi kesulitan.

Maqasid as-Syariah termasuk kategori hajjiyah dalam menjaga keturunan, ialah diharamkan berpelukan dengan yang bukan muhrim, karena akan menyebabkan terjadinya zina. Sedang hajjiyat dalam hal penjagaan harta, seperti diharamkan ghasab dan merampas, keduanya tidak menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil kembali. Sedangkan hajjiyat yang berkaitan dengan penjagaan akal seperti diharamkannya meminum khamar walau hanya sedikit karena kadar sedikit juga mengakibatkan hilangnya kesadaran.

3. Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap)

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan. Maksudnya adalah maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada sebagai pelengkap saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Di antara contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan memelihara harta adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab

hal ini berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap harta pokok (ashul mal), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang lain yang membelanjakan hartanya. Contoh tahsiniyat yang berkenaan dengan memelihara keturunan adalah diharamkan seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan perhiasan. (An-Nur : 31) Larangan wanita memakai perhiasan diluar rumah ini termasuk kategori tahsinat, karena memelihara kesempurnaan ashl nasl (pokok keturunan). Selain itu larangan tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat mengangkat harkat wanita.

Tahsiniyat dalam kaitannya dengan memelihara agama diantaranya adalah larangan terhadap dakwah yang menyimpang, yang tidak menyentuh pokok keimanan (ashlul itiqad), dimana semakin genjarnya gerakan dakwah semacam ini malah menimbulkan keraguan terhadap ajaran islam. Demikian pula larangan mempelajari kitab-kitab yang sumber-sumber ajaran agama lain bagi orang yang tidak mampu melakukan studi perbandingan secara rasional dan mendalam diantara kebenaran-kebenaran agama.

Sedangkan tahsiniyat yang berkaitan dengan memelihara akal, contohnya seperti melarang kafir dzimmi meminum dan menjual khamar ditengah masyarakat muslim, walaupun minuman keras tersebut dijual khusus untuk kalangan kafir dzimmi sendiri. Contoh tahsiniyyat dalam lapangan ibadah disyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat seperti Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan 'uqubah Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Maqasid as-Syariah untuk memelihara agama dapat dijumpai dalam QS al-Maidah ayat 3, al-Anbiya ayat 10, dan luqman ayat 13.

D. Ijtihad antara Maslahat dan Mafsadat

Dalam implementasinya hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia mungkin saja mengalami benturan-benturan. Pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadat (kerusakan) bisa saja terjadi pada waktu bersamaan. Artinya aturan hukum (Syariat) itu bisa jadi maslahat bagi sekelompok orang namun disaat yang sama menjadi mafsadat bagi orang lain, demikian juga yang bersifat individual. Saling bertentangan atau berbenturan antara

kemaslahatan dan mafsadat dalam satu waktu tersebut tentu menghendaki adanya pilihan untuk mendahulukan dan meninggalkan salah satunya.

Berkaitan dengan penanganan masalah ini Yusuf Qordawi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka ada beberapa metode untuk solusi tersebut. Yakni: pertama, metode penyesuaian (Sabil al-Taufiq), dan kedua, metode penentuan prioritas (sabil al-taglib wa al-tarjih).²⁰ Pertama, Metode penyesuaian (sabil al-taufiq) dalam kemaslahatan. Metode ini dapat dilihat seperti dalam kasus poligami (ta'adud al-jauzaat). Syariat Islam menyesuaikan aturan mengenai jumlah istri-istri yang boleh dinikahi berbeda dengan syariat Nabi Isa dan Musa. Sementara syariat Islam sesuai dengan karakteristiknya yang moderat menempatkan kemaslahatan bagi pihak laki-laki dan perempuan. Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu namun dibatasi sampai 4 (empat), dan kebolehan tersebut disertai syarat "adil". Artinya syariat Islam mewajibkan si suami untuk menyamakan seluruh istri-nya dalam nafkah, pangan, sandang dan papannya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berpihak pada kepentingan laki-laki, tetapi juga perempuan. Dan ini adalah bentuk metode penyesuaian (sabil al-taufiq) dalam kemaslahatan.

Kedua, Metode penentuan prioritas (sabil al-taglib wa al-tarjih). Metode taglib dan tarjih berawal dari kenyataan bahwa tingkatan kemaslahatan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Tahsiniyat tidaklah berada pada tingkat hajiyat. Hajiyat tidak berada di posisi daruriyat, karena memelihara kemaslahatan daruriyat lebih penting dan lebih diutamakan daripada yang lain. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara tahsiniyat dengan hajiyat, maka hajiyat harus didahulukan. Begitu pula jika tahsiniyat dan hajiyat bertentangan dengan daruriyat, maka daruriyat harus lebih diutamakan secara mutlak.

Selanjutnya, kemaslahatan kategori daruriyat juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri; yang tertinggi adalah hifdz ad-din (menjaga agama), kemudian hifdz an-nafs (melindungi jiwa/nyawa), menjaga akal, menjaga kehormatan, dan yang terendah adalah menjaga harta. Dengan demikian, bila terdapat sebuah perintah untuk melindungi nyawa seseorang dan merusak harta, atau sebaliknya: menghilangkan nyawa dan melindungi harta, maka melindungi nyawa harus didahulukan dan diprioritaskan. Jika dengan melindungi nyawa kemudian mengakibatkan kehancuran agama, maka melindungi agama

²⁰ Yusuf Qardawi, *Madhal*.....h. 67-68

harus diutamakan, meskipun itu mengakibatkan hilangnya nyawa. Misalnya, berperang (jihad) di jalan Allah dan membunuh orang yang murtad. Begitu juga misalnya melindungi nyawa seseorang mengakibatkan hilangnya nyawa banyak orang, maka melindungi nyawa orang banyak itu harus diprioritaskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah sebuah kaedah/prinsip dalam hukum Islam.

ان المصالح اذا تعارضت يحصل اعلاهما بتفويت ادناها

Artinya: "apabila beberapa kemaslahatan berbenturan atau bertentangan, maka tingkat kemaslahatan tertinggi lebih didahulukan daripada yang lebih rendah". Kebalikannya adalah kaedah yang lain:

اذا تعارضت المفسدان او المضار فیر تكب اخفها تغاديا لما هو اشد

Artinya: "apabila beberapa kerusakan (mafsadah) berbenturan atau bertentangan, maka tingkat kerusakan yang paling ringan didahulukan daripada yang lebih berat".

Para ulama mengambil contoh kaedah yang kedua dari kisah Alqur'an dalam surah al-Kahfi, yakni teman Nabi Musa yang membakar perahu, padahal itu merupakan kerusakan yang nyata, namun teman Nabi Musa lebih memilih perbuatan merusak itu untuk menghindari munculnya kerusakan yang lebih besar (seandainya perahu itu tidak lenyap).

Atas dasar inilah kemudian muncul kaedah besar lainnya:

اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا باراكبا اخفها

Artinya: "Jika dua mafsadah saling berbenturan, maka harus dicari yang lebih besar bahayanya, dan mengerjakan yang paling ringan bahayanya".

Berdasarkan kaidah ini pulalah diambil sebuah prinsip, bahwa apabila dua perbuatan yang merusak berbenturan antara individu dengan masyarakat, maka masyarakat harus lebih didahulukan dengan lebih memilih kerusakan individual, karena menjaga kehidupan masyarakat banyak sama artinya dengan menjaga kehidupan individu, menghancurkan tatanan sosial juga sama dengan menghancurkan struktur individu. Sekiranya kita melindungi nyawa satu orang dengan mengorbankan nyawa banyak orang, maka tidak tertutup kemungkinan akan munculnya bahaya yang lebih berlipat ganda yang menimpa orang tersebut.

E. Penutup

Kajian terhadap maqasid as-syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena maqasid as-syariah dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam nash. Masalah muamalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, yang aturan-aturan hukumnya hanya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja, atau bersifat zanni (tidak pasti), maka manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan keagamaan yang senantiasa mengitarinya.

Maqasid al-Syaria'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal inti disebut juga dengan al-Kulliyat al-khams atau ad-dharurat al-khams. Kemaslahatan manusia dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya hal-hal yang esensi dari kelima unsur ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan dan penjagaan lima hal yang merupakan inti dari maqasid syari'ah. Kelima Penjagaan dan pemeliharaan tersebut: Memelihara Agama (al-Muhafazhah ala al-Diin), Memelihara Jiwa (al-Muhafazhah ala an-Nafs), Memelihara Akal (al-Muhafadzah ala al-'Aql), Memelihara Keturunan (al-Muhafadzah ala an-Nasl) dan Memelihara Harta (al-Muhafadzah ala al-Mal). Maslahat/Maqasid Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu tingkatan. terbagi menjadi tiga tingkatan: Kebutuhan Dharuriyat (Primer) : Kebutuhan hajjiyat (Sekunder) dan Kebutuhan Tahsinayat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap).

Pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadat bisa saja terjadi pada waktu bersamaan. Ada dua metode yang dapat digunakan yakni Metode penyesuaian (sabil al-taufiq) dalam kemaslahatan. Metode penentuan prioritas (sabil al-taglib wa al-tarjih). Metode taglib dan tarjih berawal dari kenyataan bahwa tingkatan kemaslahatan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara tahsiny dengan hajjiyat, maka hajjiyat harus didahulukan. Begitu pula jika tahsiny dan hajy bertentangan dengan darury, maka darury harus lebih diutamakan secara mutlak.

DAFTAR BACAAN

- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, Maqasid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Rusaini, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi (Beirut: Muassasah al-Jamiah, 1992)
- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 1996).
- Ismail M. Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- M. Ibn Ismail al-Bukhari, Matan al-Bukhari, (Singapura: Maktabah wa Matbaah Sulainan Zamar'i, t.th), II.
- M. Rawwas Qol'ajy, Mabahis Fi al-Iqtisad al-Islamiyah min Usulih al-Fiqhiyyah, (Beirut, Dar an-Nafais, 1991)
- Moh. Thahir Ibn 'Asyur, Maqashid Syari'at al-Islamiyah, (Yordan: Dar Nafais, 2001)
- Nawir Yuslem, Ibn Qayyim's Reformulation of The Fatwa, Bandung, Cita Pustaka, 2012
- Yasser Audah, Fiqh al-Maqasid (USA, Al-Ma'had al-alimy lil fikr al-Islamy, 2007)
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah (Amman: Dar al-Nafais, 2000)
- Yusuf Qardawi, Madhal Lidirasah as-Syariah al-Islamiyyah, Qohirah: Maktabah Wahbah, 2001

E. Penutup

Kajian terhadap maqasid as-syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena maqasid as-syariah dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam nash. Masalah muamalah atau sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, yang aturan-aturan hukumnya hanya dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja, atau bersifat zanni (tidak pasti), maka manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan keagamaan yang senantiasa mengitarinya.

Maqasid al-Syari'ah yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal inti disebut juga dengan al-Kulliyat al-khams atau ad-dharurat al-khams. Kemaslahatan manusia dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya hal-hal yang esensi dari kelima unsur ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan dan penjagaan lima hal yang merupakan inti dari maqasid syari'ah. Kelima Penjagaan dan pemeliharaan tersebut: Memelihara Agama (al-Muhafazhah ala al-Diin), Memelihara Jiwa (al-Muhafazhah ala an-Nafs), Memelihara Akal (al-Muhafadzah ala al-'Aql), Memelihara Keturunan (al-Muhafadzah ala an-Nasl) dan Memelihara Harta (al-Muhafadzah ala al-Mal). Maslahat/Maqasid Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu tingkatan. terbagi menjadi tiga tingkatan: Kebutuhan Dharuriyat (Primer) : Kebutuhan hajjiyat (Sekunder) dan Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap).

Pertentangan antara kemaslahatan dan mafsadat bisa saja terjadi pada waktu bersamaan. Ada dua metode yang dapat digunakan yakni Metode penyesuaian (sabil al-taufiq) dalam kemaslahatan. Metode penentuan prioritas (sabil al-taglib wa al-tarjih). Metode taglib dan tarjih berawal dari kenyataan bahwa tingkatan kemaslahatan antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara tahsiny dengan hajjiyat, maka hajjiyat harus didahulukan. Begitu pula jika tahsiny dan hajj bertentangan dengan darury, maka darury harus lebih diutamakan secara mutlak.

**PROFIL JURNAL SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

NAMA JURNAL

JURISPRUDENSI

(Jurnal Ilmu Syariah, Perundang Undangan dan Ekonomi Islam)

VISI:

Menuju Akademisi Muslim Profesional
Berwawasan Syariah, Aktual
dan Transformatif

MISI:

Menyelenggarakan Publikasi Ilmiah Yang Berorientasi Pada
Pengembangan Tradisi Keilmuan Dan Ketrampilan
Yang Berbasis Ilmu Syariah Secara Profesional
Dalam Mendukung Tri Dharma
Perguruan Tinggi

Alamat:

Jalan - Meurandeh - Langsa Lama STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Telp. 0641 - 23129 Fax. 0641 - 42139 Kota Langsa

